



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2018



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUMKLHK



GAKKUM\_KLHK



GAKKUM KLHK

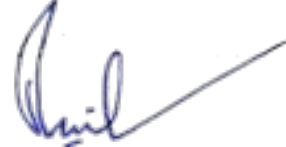
## PENGANTAR

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah menyebutkan bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun Perjanjian Kinerja, tidak terkecuali Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 ini sebagai pertanggungjawaban program di dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan didalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dalam penggunaan sumber daya anggaran yang telah di alokasikan sebagaimana tertuang dalam KRISNA ( Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 memuat sasaran program/kegiatan yang telah di susun berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Selanjutnya Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kinerja di Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja ini.

Jakarta,       Desember 2017  
Sekretaris Direktorat Jenderal



Ir. Kemal Amas, M.Sc



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2017

Pihak Kedua,

  
Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

  
Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

No. (1)	Sasaran Program/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Seluruh pemegang izin lingkungan menaati peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	65 persen
2.	Meningkatnya Hak-Hak Negara atas Produksi Hasil Hutan	Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, penyelundupan dan peredaran ilegal TSL	40 Kasus
3.	Meningkatkan kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	Seluruh unit kawasan hutan (termasuk kawasan konservasi) yang dapat dilindungi dari gangguan keamanan hutan	5.000.000 ha

**No.**

**Program/ Kegiatan**  
**Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi.
2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH).
3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Anggaran (x Rp.1000,-)**  
**372.606.381**

Jakarta, Desember 2017

MENTERI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN



Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Kemal Amas, M.Sc  
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

l. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan

Ir. Kemal Amas, M.Sc  
NIP. 19590725 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK	SAKIP Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019;	76 Poin

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;

Rp. 55,952,188,000,-

Desember 2017

Pihak Kedua,

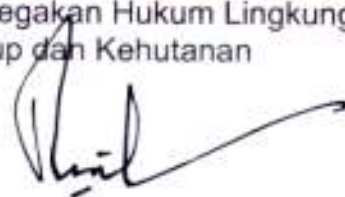
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



e. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan



Ir. Kemal Amas, M.Sc  
NIP. 19590725 198603 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yazid Nurhuda, SH., MA  
Jabatan : Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Pengaduan,  
Pengawasan dan Sanksi  
Administrasi

Yazid Nurhuda, SH., MA  
NIP. 19681209 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	35% dari 1000 Pengaduan (350 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	30% dari 500 Izin (150 Izin)
		Penerapan Sanksi Administrasi	70%
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	260 Orang
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi   | Rp. 18,894,524,000,- |
| 2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Rp. 946,970,000,-    |
|   | Rp. 19.841.494.000,- |

Januari 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi



Yazid Nurhuda, SH., MA  
NIP. 19681209 199303 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jasmin Ragil Utomo, SH, MH  
Jabatan : Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan Hidup

Jasmin Ragil Utomo, SH, MH  
NIP. 19640603 199203 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Pendaftaran Gugatan Perdata Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	10 Gugatan
		Kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	75 %
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Rp. 18.199.000.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 941.570.000,-
Total	Rp. 19.140.570.000,-

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup



Jasmin Ragil Utomo, SH, MH  
NIP. 19640603 199203 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drh. Indra Exploitasia  
Jabatan : Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Hutan

Drh. Indra Exploitasia  
NIP. 19660618 199203 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN HUTAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi	750.000 Hektar
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum	1.127 Orang
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 23,485,762,000,-
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<u>Rp. 1,177,280,000,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 24.663.042.000,-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

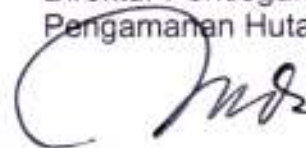
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Pencegahan dan  
Pengamanan Hutan



Drh. Indra Exploitasia  
NIP. 19660618 199203 2 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Yunus, M.Si  
Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pihak Pertama,

Direktur Penegakan Hukum Pidana  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Drs. Muhammad Yunus, M.Si  
NIP. 19610116 199593 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	8% dari 100 Kasus (8 Kasus)
		Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	350 Orang
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Rp. 20.026.130.000,-
2. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya	Rp. 946.970.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 20.973.100.000,-</b>

Januari 2018

Pihak Kedua,

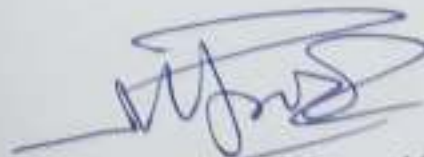
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Drs. Muhammad Yunus, M.Si  
NIP. 19610116 199503 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yazid Nurhuda, SH, MA

Jabatan : Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM.

Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2018

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM.  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur  
Penegakan Hukum Pidana  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan

Yazid Nurhuda, SH, MA  
NIP. 19630705 198303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara Profesional	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap)	8% dari 100 Kasus (8 Kasus)
		Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	350 Orang
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 20.897.130.000,-
1. Meningkatnya Jumlah Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara Profesional	Rp. 20.026.130.000,-
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 871.000.000,-

Jakarta, Juni 2018

Pihak Kedua,


Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM.  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Direktur  
Penegakan Hukum Pidana  
Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan



Yazid Nurhuda, SH, MA  
NIP. 19630705 198303 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edward Sembiring, S.Hut, M.Si  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa  
Sumatera

Edward Sembiring, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730530 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH SUMATERA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	920.000 Ha
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	173 Orang
2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	22 % dari 1000 Pengaduan (220 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	20 % dari 500 Izin (100 Izin)
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	10 PPLH
3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	16% dari 100 Kasus (16 Kasus)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	10 PPNS
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 19.165.000.000,-
2. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 6.253.493.000,-
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 12.607.870.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 20.075.666.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 58.102.029.000,-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

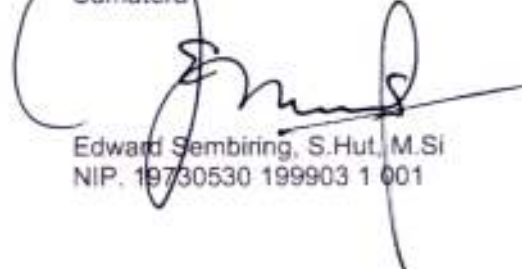
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



1. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Sumatera



Edward Sembiring, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730530 199903 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa  
Bali dan Nusa Tenggara

Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc  
NIP. 19640307 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH JAWA, BALI DAN NUSA TENGGARA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	800.000 Ha
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	140 Orang
2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	17 % dari 1000 Pengaduan (170 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	22 % dari 500 Izin (110 Izin)
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	10 PPLH
3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	15% dari 100 Kasus (15 Kasus)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	10 PPNS
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 16,751,400,000,-
2. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 6,094,583,000,-
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 12,355,010,000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 16,531,783,000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 51,732,776,000,-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

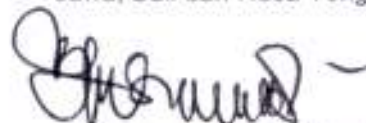
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



Benny Bastiawan, S.Kom, M.Sc  
NIP. 19640307 199203 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Subhan, S.Hut, M.Si  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

e. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa  
Kalimantan

Subhan, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730320 199903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH KALIMANTAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	880,000 Ha
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	143 Orang
2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	10 % dari 1000 Pengaduan (100 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	16 % dari 500 Izin (80 Izin)
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	5 PPLH
3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	15% dari 100 Kasus (15 Kasus)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	10 PPNS
4	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
		Layanan Perkantoran	1 Layanan

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 15,097,238,000,-
2. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 3,910,000,000,-
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 11.572.025.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 17.662.648.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 48,241,911,000,-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Kalimantan



Subhan, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730320 199903 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Muhammad Nur, MSP  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

l. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Sulawesi

Ir. Muhammad Nur, MSP  
NIP. 19670727 199703 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH SULAWESI**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tertelaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	850,000 Ha
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	117 Orang
2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	8 % dari 1000 Pengaduan (80 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	8% dari 500 izin (40 Izin)
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	10 PPLH
3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	15% dari 100 Kasus (15 Kasus)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	10 PPNS

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 12.219,400,000,-
2. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 3,270,000,000,-
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 11.063.645.000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 15.144.534.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 35,157,579,000 .-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

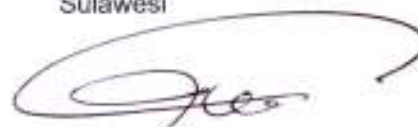
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Sulawesi



Ir. Muhammad Nur, MSP  
NIP. 19670727 199703 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.G Martana, S.Hut, M.H  
Jabatan : Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
Jabatan : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Desember 2017

Pihak Kedua,

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Maluku Papua

A.G Martana, S.Hut, M.H  
NIP. 19721002 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
WILAYAH MALUKU PAPUA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 34 Provinsi	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan Sosialisasi, Patroli dan Operasi	800,000 Ha
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas Polisi Kehutanan dalam Pelaksanaan Pengamanan dan Penegakan Hukum memenuhi standar minimum	100 Orang
2	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan yang masuk tertangani	8 % dari 1000 Pengaduan (80 Pengaduan)
		Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dan tingkat penataan perusahaan	4% dari 500 Izin (20 Izin)
		Sarana, Prasarana dan Kapasitas PPLH dalam Pelaksanaan Pengawasan memenuhi standar minimum	5 PPLH
3	Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional	Kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan Lengkap)	6 % dari 100 Kasus (6 Kasus)
		Peningkatan Kapasitas dan Penyediaan Sarana Prasarana PPNS	10 PPNS

Program/Kegiatan

1. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Rp. 11,340,800,000,-
2. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp. 1.850,000,000,-
3. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp. 10,378,120,000,-
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 12,705,562,000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 36.274.482.000,-</b>

Desember 2017

Pihak Kedua,

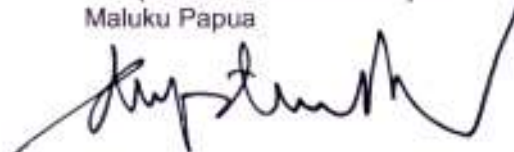
Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM  
NIP. 19660711 199203 1 018

Pihak Pertama,

Kepala Balai Pengamanan dan  
Penegakan Hukum Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan Wilayah  
Maluku Papua



A.G Martana, S.Hut, M.H  
NIP. 19721002 199903 1 001



Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan

2018